



DEPRESI EKONOMI DAN KRISIS KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL 1930-1936

Ilham Nur Utomo

ilhamroot@gmail.com

Universitas Diponegoro, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 3 May 2020

Revised: 24 June 2020

Accepted: 30 June 2020

Published: 30 June 2020

Permalink/DOI

10.17977/um020v14i12020p62

Copyright © 2019, *Sejarah dan Budaya*. All right reserved

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

ABSTRACT

This article discusses the impact of economic depression and the people's crisis of trust in the colonial government's policy regarding the resolution of the problem. The method used in this study was historical method that consists of heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Economic depression in the 1930s was a complex phenomenon that did not only affect the East Indie's economy. In this regard, the relationship between the colonial government and the people was unique when the former attempted to solve problems using intervening policy. Economic depression was caused by external factors and worsened by internal factors due to overproduction. This condition affects business sectors run by Europeans and Bumiputra. The government's and private companies' retrenchment led to unemployment, poverty, and crimes. The government's discrimination was one of the factors triggering bumiputra's response. This condition culminated when the labor union and movement organization launched their protests. People's crisis of trust in the colonial government arose due to the government's inability to proportionally solve problems during the economic depression period.

KEYWORDS

Economic Depression, Colonial Government, Labor Union, National Movement.

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai dampak depresi ekonomi dan tingkat kepercayaan rakyat atas kebijakan pemerintah kolonial yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dampak tersebut. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Depresi ekonomi tahun 1930an merupakan peristiwa kompleks yang tidak hanya berdampak pada perekonomian Hindia Belanda. Dalam hal ini, relasi antara pemerintah kolonial dan rakyat menjadi menarik ketika pemerintah berusaha mengatasi masalah dengan kebijakan campur tangan. Depresi ekonomi yang dipicu oleh faktor eksternal dan diperparah oleh faktor internal karena kelebihan produksi berdampak pada merosotnya perekonomian Hindia Belanda. Dampak tersebut menghantam bidang usaha yang digerakan oleh bangsa Eropa dan bumiputra. Penghematan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan perusahaan swasta menimbulkan peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Sikap diskriminatif pemerintah kolonial pun menjadi salah satu faktor pemicu respon keras bumiputra. Puncaknya yaitu melakukan gerakan protes melalui serikat buruh dan organisasi pergerakan. Krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kolonial muncul karena ketidakmampuan pemerintah kolonial mengatasi masalah selama masa depresi ekonomi secara proporsional.

KATA KUNCI

Depresi Ekonomi, Pemerintah Kolonial, Serikat Buruh, Pergerakan Nasional.

PENDAHULUAN

Praktik kolonisasi oleh pemerintah kolonial pada periode awal abad 20 memberi keuntungan bagi sebagian pihak yang berkepentingan. Wujud kolonisasi yang meliputi edukasi, irigasi, dan emigrasi merupakan pengejawantahan dari kebijakan politik etis. (Sudarno, 2019) menyebut kebijakan tersebut dengan istilah politik kolonialisasi baru, di mana politik etis bertujuan untuk menguasai dan menjaga kekuasaan di Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial. Masuknya kritikan kepada pemerintah kolonial atas praktik kolonialisme yang buruk pada abad 19 turut mendorong dilakukannya reorientasi politik tersebut.

Perkembangan pada sektor ekonomi menunjukkan hasil signifikan. Politik etis telah menumbuhkan perekonomian di Sumatera melalui program transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan buruh, yang sebagian besar berasal dari Jawa. Perkebunan menjadi sektor utama dalam pengembangan ekonomi di Sumatera. Sejak awal abad 20, bersamaan dengan politik etis, perkembangan modal swasta di luar Jawa muncul secara berkelanjutan, kecuali Sumatera Timur yang sudah berkembang sejak tahun 1860an (Leirissa, 1996: 74). Selain itu, muncul komoditas baru yang dikembangkan seperti karet dengan nilai ekonomis tinggi. Politik etis secara umum menunjukkan kemajuan dalam sektor ekonomi yang dapat dilihat melalui perkembangan perkebunan dan penyerapan tenaga kerja dari Jawa ke Sumatera.

Di balik meningkatnya nilai perekonomian, pemerintah kolonial dihadapkan pada konstelasi politik global. Perang Dunia I membawa dampak yang besar, tidak hanya pada sektor politik, tetapi juga pada sektor ekonomi. Pada awal tahun 1920an setelah berakhirnya Perang Dunia I, terjadi krisis ekonomi yang menghantam dunia, dan tentunya juga Hindia Belanda. Perang mengakibatkan berkurangnya barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari karena telah memusnahkan faktor-faktor produksi dalam jumlah signifikan (Sulistyo, 1995: 54). Minimnya barang yang tidak sebanding dengan permintaan menjadikan instabilitas harga barang. Rakyat yang menderita menyuarakan protes, di samping meluasnya organisasi pergerakan pada tahun 1920an. Namun secara umum, krisis ekonomi mereda memasuki pertengahan 1920an.

Menjelang tahun 1930, perekonomian dunia kembali diguncang krisis yang lebih besar. Peristiwa tersebut dikenal sebagai depresi ekonomi yang meluas pada tahun 1930an dalam tempo yang lebih lama dan dampak yang lebih hebat dari krisis sebelumnya. Susanto Zuhdi (2002: 67) menerangkan bahwa konsep resesi dan depresi memiliki perbedaan, di mana resesi berlangsung lebih pendek dari depresi. Sedangkan Ingleson (2013: 211) menyebutkan bahwa tahun 1930an adalah dekade depresi ekonomi yang panjang, yang terjadi di seluruh dunia dengan dampak pengangguran yang sebelumnya belum pernah terjadi. Depresi ekonomi dikenal pula dengan sebutan *zaman meleset* atau *malaise*. Istilah tersebut banyak digunakan oleh pers bumiputra pada tahun 1930an untuk menyebut masa depresi ekonomi yang serba sulit.

Perbedaan dengan krisis sebelumnya yang dampak dan waktunya tidak sehebat dan selama depresi ekonomi 1930an, menjadikan depresi ekonomi 1930an menarik dan penting untuk dikaji. Terlebih pada periode 1931-1936 Hindia Belanda berada di bawah kepemimpinan Gubernur Jendral de Jonge yang bertangan besi. Di samping itu, aktivisme

serikat buruh dan organisasi pergerakan selama periode awal 1930an sebagai respon atas depresi ekonomi menarik untuk ditelusuri, mengingat depresi ekonomi berdampak pada segala bidang kehidupan masyarakat di Hindia Belanda.

Berdasar latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan membahas dampak depresi ekonomi terhadap kepercayaan rakyat Hindia Belanda kepada pemerintah kolonial. Krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kolonial, dan bagaimana cara pemerintah mengatasi depresi ekonomi yang mengundang respon dari rakyat, khususnya bumiputra menjadi masalah utama yang diangkat. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka pembahasan artikel ini terdiri dari tiga bagian, yaitu mengulas awal kemunculan depresi ekonomi; dampak depresi ekonomi di Hindia Belanda pada sektor usaha dan sosial, dan tumbuhnya krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kolonial. Tahun 1930-1936 merupakan temporal penelitian ini karena tahun 1930 dampak depresi ekonomi mulai masuk ke Hindia Belanda, dan tahun 1936 perekonomian Hindia Belanda secara perlahan mulai meningkat berdasar statistik ekspor Hindia Belanda, serta bersamaan dengan berakhirnya masa kepemimpinan de Jonge atas tanah jajahan.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa rekaman dan peninggalan masa lalu sebagai sumber sejarah secara kritis (Gottschalk & Notosusanto, 1975: 32). Sumber yang digunakan meliputi sumber primer berupa terbitan resmi pemerintah kolonial yaitu *Indisch Verslag* dan laporan rahasia pemerintah kolonial terhadap aktivitas organisasi pergerakan kemerdekaan, sedangkan sumber sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut terlebih dahulu melewati kritik sumber yang dilakukan dengan mengkoroborasikannya guna didapatkan sumber yang reliabel.

Penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial yang menekankan pada aspek-aspek sosial. Menurut (Kuntowijoyo, 2003: 39) bahan garapan sejarah sosial sangat luas, sehingga mempunyai relasi erat dengan sejarah ekonomi. Dalam hal ini, timbulnya depresi ekonomi yang didasarkan atas peristiwa ekonomi telah memberi dampak signifikan dalam bidang sosial yang luas. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini juga berelasi dengan aspek-aspek ekonomi dan politik. Struktur sosial pada masa kolonial yang terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu bangsa Eropa, timur asing, dan bumiputra semakin terlihat tegas pada masa depresi ekonomi. Secara struktural terdapat pembagian fungsi sosial, di mana bangsa Eropa yang memegang kekuasaan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan depresi ekonomi. Bumiputra sebagai struktur yang berada paling bawah menjadi kelompok yang paling tertekan selama depresi ekonomi, sehingga menunjukkan gejala antarstruktur sosial. Dalam hal ini strukturalisme digunakan sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini untuk mendedah krisis kepercayaan rakyat (bumiputra) dan sikap pemerintah kolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Depresi Ekonomi

Perekonomian dunia pada periode 1900-1942 dihantam oleh gelombang krisis yang terjadi pada awal tahun 1920an dan 1930an. Dari kedua peristiwa tersebut, depresi ekonomi 1930an merupakan peristiwa yang paling menyengsarakan. Depresi ekonomi yang melemahkan jaringan perdagangan internasional tersebut berawal dari turunnya harga saham di Wall Street, Amerika Serikat pada akhir 1929. Terjadi penurunan permintaan dan peningkatan produksi. Banyaknya hasil produksi tidak sebanding dengan permintaan yang rendah karena kenaikan harga yang tajam. Jika ditarik ke belakang, tahun 1920an merupakan dasar yang menyebabkan depresi ekonomi 1930an. Pada tahun 1920an terjadi peningkatan produksi secara cepat, akan tetapi keuntungan yang diberikan kepada buruh sangat minim (Zuhdi, 2002: 68). Hasil keuntungan digunakan untuk membangun pabrik-pabrik baru yang kemudian mengalami *overproductie* sebagai puncaknya.

Kelebihan produksi berujung pada ketimpangan antara permintaan dan hasil produksi. Perusahaan melakukan pemecatan guna meminimalisasi kerugian, sehingga pengangguran di dunia meningkat selama masa depresi ekonomi. Amerika Serikat yang diyakini sebagai tempat awal terjadinya depresi ekonomi mengalami kenaikan jumlah pengangguran, yaitu dari 1,6 juta pada 1929 menjadi 12,8 juta pada 1933 (Reed, 2010: 2). Peningkatan pengangguran terjadi di seluruh belahan bumi, khususnya daerah-daerah industri yang terhubung dengan perdagangan internasional. Negara-negara industri sejak awal sudah langsung merasakan guncangan depresi ekonomi karena sebagai pusat industri dan sentrum buruh yang dipekerjakan.

Selain penyebab depresi ekonomi yang telah dijelaskan, terdapat pandangan beberapa ahli mengenai penyebab depresi ekonomi yang berkaitan dengan Hindia Belanda. Lindblad (2016: 26) menyebutkan bahwa depresi ekonomi terjadi karena disebabkan oleh faktor dari luar (eksternal). Hal ini merujuk pada buruknya konstelasi pasar dunia sejak pertengahan 1920an. Pandangan berbeda dikemukakan Osseweijer (2016: 114), menurutnya depresi ekonomi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Kelebihan produksi yang terjadi di Hindia Belanda semakin memperparah dampak depresi ekonomi, sehingga faktor dari dalam turut berpengaruh dalam proses depresi ekonomi. Sedangkan Sir Arthur Lewis memandang bahwa depresi ekonomi disebabkan oleh kemerosotan harga bahan mentah yang berdampak pada kemerosotan ekonomi Hindia Belanda yang bergantung pada ekspor barang mentah (Notosusanto & Poesponegoro, 2008: 255).

Depresi ekonomi baru dirasakan dampaknya di Hindia Belanda memasuki tahun 1930. Data statistik yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial melalui *Indisch Verslag* menunjukkan disparitas nilai ekspor antara tahun 1929 dan 1930. Terjadi penurunan pada tahun 1930 dari tahun sebelumnya secara umum. Harga komoditas ekspor juga menurun sejak tahun 1930 secara persisten selama tahun 1930an. Pendapatan pemerintah dari sektor pajak juga menurun pada tahun 1930 (*Indisch Verslag 1932*: 35).

Hal ini menunjukkan bahwa tahun 1930 menjadi awal masuknya dampak depresi ekonomi di Hindia Belanda secara umum.

Berbagai pandangan mengenai penyebab depresi ekonomi yang menghantam Hindia Belanda menunjukkan bahwa Hindia Belanda terkoneksi dengan perdagangan internasional. Dampak depresi ekonomi yang berawal dari Amerika Serikat mampu menjangkau Hindia Belanda yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor perkebunan. Sama dengan negara lainnya di dunia, depresi ekonomi berdampak luas di Hindia Belanda, khususnya sektor perkebunan, pertanian, dan industri modern sejak awal meletusnya depresi ekonomi 1930an. Dampak ekonomi tersebut menjalar hingga memengaruhi kehidupan sosial dan politik.

Dampak Depresi Ekonomi Di Hindia Belanda

Depresi ekonomi memberi dampak besar bagi Hindia Belanda. Keadaan Hindia Belanda pada masa depresi ekonomi merupakan suatu perekonomian yang sangat kompleks (Wibowo, 2012: 23). Berbagai sektor usaha mengalami kemerosotan, yang dapat dilihat dari berkurangnya jumlah pabrik di Hindia Belanda pada tahun 1935 jika dibandingkan dengan tahun 1930, yang meliputi pabrik gula, pabrik pengolahan kayu, pabrik metal dan mesin, serta pabrik yang memproduksi makanan, minuman dan tembakau (Wibowo, 2012: 23). Kemerosotan yang dialami oleh berbagai sektor usaha berdampak pada kehidupan penduduk Hindia Belanda. Hal tersebut menggambarkan bahwa dampak depresi ekonomi menerjang kehidupan ekonomi dan sosial di Hindia Belanda. Oleh sebab itu, pada bagian ini akan dibahas bagaimana depresi ekonomi berdampak pada bidang usaha dan kehidupan sosial penduduk Hindia Belanda.

A. Kemerosotan Bidang Usaha

Memasuki pertengahan 1920an, pemerintah kolonial mengembangkan berbagai komoditas hasil perkebunan yang dijadikan sebagai andalan ekspor Hindia Belanda. Pengembangan yang berlangsung tidak terlepas dari kerja riset ilmiah yang dilakukan untuk mendorong peningkatan hasil. Usaha yang dilakukan pun membuahkan hasil dengan meningkatnya hasil perkebunan yang dikembangkan. Salah satu komoditas tersebut adalah karet yang nilainya terus mengalami kenaikan pada tahun 1920an. Karet merupakan komoditas ekspor terpenting pada tahun 1925, 1926, dan 1927 (Stroomberg, 2018: 367). Di samping karet terdapat pula teh, kopra, kopi, dan tembakau. Sejak krisis ekonomi pada awal 1920an berakhir, perdagangan ekspor Hindia Belanda mengalami kenaikan pada pertengahan 1920an.

Di balik meningkatnya aktivitas ekspor hasil perkebunan, depresi ekonomi 1930an meruntuhkan kejayaan usaha perkebunan di Hindia Belanda. Terjadinya ketidakseimbangan antara harga ekspor dan impor secara langsung memengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Perusahaan yang mengandalkan ekspor sangat merasakan hantaman depresi ekonomi karena harga yang sangat rendah. Selain kesulitan ekspor, muncul pesaing-pesaing yang merupakan negara ekspor baru (Notosusanto & Poesponegoro, 2008: 253). Dari sekian komoditas ekspor di Hindia Belanda, hasil perkebunan mengalami kemerosotan yang signifikan selama masa depresi ekonomi. Hampir seluruh hasil perkebunan mengalami penurunan harga dan

jumlah ekspor secara persisten selama tahun 1930an yang menyebabkan menurunnya pendapatan pihak swasta dan pemerintah kolonial. Hal tersebut karena komoditas perkebunan merupakan tumpuan ekspor Hindia Belanda.

Karet sebagai komoditas ekspor yang banyak dikembangkan di Sumatera pada 1920an secara signifikan mengalami penurunan harga pada tahun 1930. Harga karet turun 10% dari harga sebelum depresi ekonomi (Zuhdi, 2002: 69). Penurunan harga menyebabkan beberapa pemilik perkebunan berhenti melakukan penyadapan hingga batas waktu tertentu (Neytzell de Wilde, Moll, & Gooszen, 1936: 27). Pengusaha perkebunan karet terpuak atas penurunan harga yang berkelindan dengan turunnya jumlah ekspor. Namun, dibanding dengan komoditas perkebunan lainnya, karet mengalami fluktuasi harga dan jumlah ekspor. Pada tahun 1933, harga karet kembali naik dan produksi mengalami peningkatan. Pada tahun 1932 total ekspor yang dihasilkan dari perusahaan sebanyak 153.176 ton, kemudian meningkat menjadi 170.920 ton pada tahun 1933 (*Indisch Verslag 1936*: 77). Kenaikan berlanjut hingga tahun 1934.

Tabel. 1 Ekspor Karet Perusahaan 1931-1935 (dalam ton)

Tahun	Jumlah Ekspor		
	Jawa	Luar Jawa	Total
1931	77.184	95.100	172.284
1932	62.315	90.761	153.076
1933	75.063	95.857	170.920
1934	88.689	110.916	199.605
1935	62.133	85.053	147.186

Sumber: *Indisch Verslag 1936*.

Perkebunan yang memproduksi komoditas selain karet mengalami kemerosotan signifikan dan berlangsung secara persisten. Penurunan jumlah ekspor terjadi pada teh. Pada tahun 1933 teh mengalami penurunan jumlah ekspor menjadi 71,9 juta kg dari 78,8 juta kg pada tahun sebelumnya (Statistics, 1947: 80). Ekspor teh ke Belanda menurun secara persisten, dan negara tujuan ekspor teh lainnya lebih bersifat fluktuatif. Sedangkan ekspor kopi, kopra, dan kapas bersifat fluktuatif meskipun cenderung menunjukkan tren menurun. Penurunan jumlah ekspor dibarengi dengan menurunnya harga-harga komoditas perkebunan selama depresi ekonomi. Perkebunan secara umum mengalami dampak yang berarti selama masa depresi ekonomi.

Tabel 2. Harga Komoditas Ekspor Penting Hindia Belanda (dalam gulden)

Tahun	Kopi Robusta (per 100 kg)	Kopra (per 100 kg)	Kapas (per 100 kg)	Teh (per ½ kg)
1929	89,57	21,09	93,35	0,57
1930	52,90	18,02	66,06	0,46
1931	36,30	11,22	55,56	0,30

1932	39,03	8,24	42,60	0,17 ⁵
1933	31,87	6,23	31,88	0,26
1934	25,97	4,52	30,59	0,33 ⁵

Sumber: *Indisch Verslag 1935*.

Gula sebagai komoditas menguntungkan sejak abad 19 turut mengalami kemerosotan harga dan jumlah ekspor selama masa depresi ekonomi. Hal tersebut berdampak pada eksistensi pabrik gula di Hindia Belanda. Dalam kurun waktu empat tahun sejak depresi ekonomi melanda Hindia Belanda pada 1930, jumlah pabrik gula yang beroperasi di Jawa mengalami penurunan, dari 179 menjadi 54 pabrik (Schaik, 1996: 49). Tidak hanya sampai di situ, industri gula yang terhubung dengan perkebunan tebu turut mengikis jumlah lahan yang ditanami tebu. Menurut O'malley, luas lahan tanaman tebu terus mengalami penurunan pada tahun 1930-1933, meskipun mengalami sedikit kenaikan pada 1934 (*Prisma 8 Agustus 1983*: 44). Dalam hal ini menunjukkan, bahwa industri gula merupakan bidang usaha yang terintegrasi dengan sektor perkebunan yang memiliki pengaruh besar bagi perekonomian Hindia Belanda.

Bidang usaha transportasi tidak dapat terhindarkan dari dampak depresi ekonomi. Perekonomian Hindia Belanda yang saling terintegrasi antarbidang usaha menyebabkan kemerosotan yang kompleks. Turunnya ekspor komoditas perkebunan berakibat pada menurunnya mobilitas transportasi sebagai media angkut. Aktivitas di pelabuhan yang tersebar di Jawa tidak seramai sebelum masa depresi, dan pada akhirnya menjalar ke industri pembuatan alat transportasi. Dalam laporan P.W. Palte, seorang Residen Jepara-Rembang, menyatakan bahwa Berendsen, sebuah perusahaan pembuatan kapal di Lasem pada tahun 1935 hanya memproduksi 7 buah pesanan kapal dari KPM (Warto, 2010: 149). Apa yang dialami Berendsen lebih baik dibanding perusahaan pembuatan kapal lainnya yang berhenti produksi pada masa depresi ekonomi, salah satunya yaitu *Scheepwerf Taat* di Juwana.

Guna meminimalisir pengeluaran dalam hal distribusi, perusahaan melakukan kebijakan dengan pengalihan penggunaan media transportasi. Sebagai contoh pengangkutan kayu jati dari pedalaman ke pesisir utara Jawa, yang semula menggunakan kereta api (NIS) dialihkan ke penggunaan perahu karena monopoli NIS menyebabkan mahalnya biaya pengangkutan menggunakan kereta api (Warto, 2010: 93). Peralihan penggunaan kereta api ke perahu tentu memengaruhi pendapatan NIS, terlebih pada masa depresi ekonomi. Depresi ekonomi telah menumbuhkan cara-cara alternatif yang dilakukan oleh perusahaan guna menekan pengeluaran untuk mempertahankan usaha mereka yang semakin terhimpit.

Pada bidang usaha mandiri yang digerakan oleh bumiputra seperti sektor perikanan, mendapat tekanan dari rendahnya nilai jual ikan. Sedikit dari nelayan yang melaut memengaruhi sepiunya los-los penggaraman ikan. Berdasar laporan Residen Rombang yang dikeluarkan pada tahun 1931, menyebutkan bahwa terjadi penurunan penjualan ikan asin, yakni 158.650 Kg pada 1929 menurun pada 1930 menjadi 62.027 Kg (Warto, 2010: 101). Masalah lain yang dihadapi nelayan adalah sulitnya mendapat

kayu berukuran panjang yang digunakan sebagai bahan pembuatan perahu *Mayang* yang digunakan untuk melaut. Nelayan pun bergeser menggunakan perahu model baru untuk tetap dapat melaut.

Toko kelontong yang dikelola oleh kalangan menengah-bawah harus menaikkan harga dagangan guna menyelamatkan usaha mereka. Hal tersebut terjadi pada toko kelontong milik sebagian pedagang Tionghoa di Cirebon. Mereka tidak sepenuhnya menerima kebijakan pemerintah tentang batas keuntungan setiap barang yang boleh diambil (Wahid, 2009: 135). Oleh karena itu, menaikkan harga merupakan sebuah keharusan, meskipun dihadapkan pada ancaman hukuman bagi para pedagang yang diketahui melanggar. Apa yang terjadi pada toko kelontong dan nelayan selama masa depresi ekonomi telah menunjukkan bahwa dampak depresi ekonomi melanda hingga bidang usaha kecil yang digerakan oleh kelas menengah dan bawah dalam struktur sosial masa itu.

B. Pengangguran dan Kemiskinan

Merosotnya perekonomian Hindia Belanda yang ditandai dengan menurunnya harga dan jumlah ekspor komoditas unggulan, khususnya komoditas perkebunan menyebabkan perusahaan harus mengambil keputusan guna menyelamatkan usaha mereka dari kebangkrutan. Dalam hal ini, kebijakan bertumpu pada pemerintah kolonial yang kemudian diikuti oleh pihak swasta. Untuk mengatasi keuangan yang defisit, pemerintah kolonial mengambil kebijakan yang di antaranya yaitu pengurangan pegawai, pengurangan gaji, penghentian penambahan pegawai di Eropa, pensiun pegawai lebih awal, pengurangan biaya pengeluaran belanja pemerintah, dan penenaan cukai tambahan guna menambah pendapatan pemerintah (Notosusanto & Poesponegoro, 2008: 254). Dari kebijakan tersebut, yang paling terasa dampaknya bagi bumiputra adalah pemecatan pegawai atau buruh, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Pemecatan buruh di sektor swasta merupakan bentuk rasionalisasi atau penghematan (*bezuiniging*) guna meminimalisir pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan. Begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan memecat para pegawai guna menyeimbangkan kas negara yang terguncang depresi ekonomi.

Selama tahun 1930-1937, jumlah pegawai Jawatan Kereta Api Negara berkurang dari 44.089 orang menjadi 28.532 orang (Ingleson, 2015: 258). Hal serupa juga terjadi pada pegawai pegadaian. Sejak awal 1930an, pegawai pegadaian mengalami pemecatan secara bertahap. Tidak semua pegawai mengalami pemecatan, tetapi bagi mereka yang dipertahankan akan mengalami pemotongan upah. Sedangkan pada sektor swasta, buruh secara signifikan kehilangan pekerjaan mereka, terutama buruh perkebunan yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Politik kolonisasi yang dilakukan sejak awal abad 20 memperparah tingkat pengangguran. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan emigrasi, di mana tercatat pada tahun 1905-1930 dilakukan pengiriman penduduk Jawa ke Lampung sebanyak 30.000 jiwa dan 7.000 jiwa ke daerah lainnya di Sumatera (Sudarno, 2019: 124). Pengiriman tersebut didorong oleh pengembangan perkebunan di Sumatera yang membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga ketika depresi ekonomi

melanda, pengangguran tersebar di daerah-daerah perkebunan di Sumatera sebagai dampak pemecatan.

Pengangguran secara persisten mengalami peningkatan pada awal 1930an dan menyebabkan kemiskinan penduduk Hindia Belanda, terutama bumiputra yang menjadi prioritas pemecatan. Menurut Anton Lucas (1989: 21) depresi ekonomi di Hindia Belanda memberi beban yang lebih berat dibandingkan negara lain. Pengangguran pada masa itu tidak sedikit yang kemudian hidup sebagai gelandangan di perkotaan Jawa. Jumlah gelandangan terus bertambah dan mulai merambah ke golongan baru, yang disebut dengan *oom Jan* (Hudiyanto, 2009: 136). Banyak gelandangan yang berasal dari kaum bumiputra karena mereka merupakan golongan yang diutamakan dalam pemecatan. Hal ini tidak terlepas dari politik segregasi yang diskriminatif dengan menempatkan bumiputra pada kelas paling bawah. Pada masa depresi struktur sosial semakin kentara, terutama dalam upaya pemerintah kolonial mengatasi dampak depresi ekonomi. Perbedaan kehidupan antara bumiputra dengan bangsa Barat dapat dilihat dari indeks biaya hidup mereka yang berbeda, meskipun sama-sama mengalami penurunan.

Tabel 3. Indeks Biaya Hidup Bumiputra dan Eropa 1930-1936

Tahun	Bumiputra	Eropa
1930	96	98
1931	69.5	90
1932	54	81.5
1933	44.5	70.5
1934	42.5	64
1935	43	59.5
1936	41	57

Sumber: *The Changing Economy of Indonesia Vol 5, 1979.*

Selain meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, sikap diskriminatif pemerintah kolonial menyebabkan keadaan bumiputra semakin memprihatinkan. Sikap tersebut digambarkan dalam pers bumiputra, *Daulat Ra'jat* (10 Januari 1934: 2), bahwa pengangguran bangsa Eropa lebih senang kehidupannya dibandingkan dengan pengangguran bumiputra yang jauh dari kebahagiaan. Upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan hanya menjangkau struktur sosial atas, yakni bangsa Eropa. Hal tersebut didasarkan karena tanggapan pemerintah kolonial dilandasi pada pandangan atas Hindia Belanda yang terdiri dari tiga golongan masyarakat terpisah berdasar ras bangsa (Ingleson, 2013: 173). Oleh karena itu, pengangguran bumiputra hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan, sehingga kelaparan masih banyak dirasakan penduduk bumiputra di perkotaan dan perdesaan.

Kelaparan menjalar ke seluruh daerah dan meningkatkan jumlah "kaoem lapar" di Hindia Belanda. Sulitnya kehidupan di Hindia Belanda semakin diperparah oleh peningkatan jumlah penduduk dan wabah penyakit. Peningkatan penduduk sebagai

contoh terjadi di Sumatera Timur yang merupakan daerah perkebunan. Pada tahun 1880 jumlah penduduk sebanyak 90.000 jiwa, kemudian naik menjadi hampir 1,5 juta jiwa pada tahun 1930 (Pelzer, 1978: 106). Ledakan jumlah penduduk tentu menjadi catatan tersendiri selama masa depresi ekonomi. Sedangkan wabah penyakit masa depresi dikabarkan oleh pers bumiputra *Fikiran Ra'jat*. Diwartakan bahwa wabah penyakit melanda sebagian Jawa dan Sumatera. Pada 7 Agustus hingga 3 September 1932, korban pes di Hindia Belanda sebanyak 293 orang (*Fikiran Ra'jat*, 11 November 1932, 12). Selain itu, di Toba pada tahun yang sama diserang penyakit yang tidak diketahui namanya, tetapi mirip dengan kolera (*Fikiran Ra'jat*, 23 September 1932: 12).

Kriminalitas pada masa depresi ekonomi bertambah (*Daulat Ra'jat*, 20 Juli 1932, 3). Meningkatnya kriminalitas dalam bentuk pencurian dan pembegalan didorong oleh kesulitan akibat kemiskinan dan kelaparan. *Daulat Ra'jat* (20 Juli 1932: 3) mewartakan bahwa sebagian bumiputra yang kelaparan melakukan kejahatan, sebagian masuk hutan untuk mencari makanan, dan sebagian lagi diam menerima keadaan. Pada tahun 1930-1932, kriminalitas di sejumlah daerah di pantai utara Jawa meningkat. Kabupaten Pati, Rembang, Jepara, Kudus, dan Blora menunjukkan peningkatan kriminalitas secara umum, baik kejahatan kategori biasa maupun berat. Pada tahun 1930 total kejahatan di lima kabupaten tersebut sebanyak 4123 kasus, kemudian meningkat menjadi 5003 kasus pada 1931, dan 5488 kasus pada 1932 (Warto, 2010: 121).

KRISIS KEPERCAYAAN DAN SIKAP RAKYAT

Pemerintah kolonial selama masa depresi ekonomi berusaha menjalankan beberapa kebijakan guna mengatasi permasalahan kompleks yang sedang menghantam Hindia Belanda. Kaitannya dalam mengatasi masalah sosial yang berakut pada kemiskinan dan kelaparan penduduk, pemerintah kolonial mengandalkan Komite Pusat Bantuan Pengangguran. Komite Pusat mendirikan komite-komite lokal yang tersebar di beberapa daerah. Menurut Ingleson (2013: 184), semua komite tersebut memperhatikan pengangguran Eropa, tetapi sejalan dengan depresi ekonomi yang semakin parah, akhirnya mereka membantu 'pekerja utama' Indonesia dan Tionghoa. Di sini terlihat bagaimana sikap pemerintah kolonial yang tidak dapat mengatasi permasalahan sosial secara menyeluruh dan mendasarkan kebijakannya berdasar struktur sosial.

Buruknya penanganan pemerintah kolonial mendorong lahirnya komite-komite bantuan pengangguran yang digerakan oleh kelompok di luar pemerintahan. Pada tahun 1932, berdiri Badan Penolong Pengangguran di Surakarta, yang pendanaannya didukung oleh Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) (Miftahuddin, 2002: 62). Badan Penolong Pengangguran tersebut banyak mendapat simpati kaum pergerakan nasional. Sementara itu, komunitas Tionghoa di Cirebon melalui organisasi berusaha mengatasi dampak sosial depresi ekonomi, yang salah satunya yaitu Tiong Hoa Keng Kie Hwee (THKKH). THKKH merupakan organisasi buruh yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum buruh Tionghoa, yang khususnya berkaitan dengan gaji, tunjangan pensiun, kematian, dan kesejahteraan keluarga (Wahid, 2009: 145). Melalui aksi-aksi

tersebut menggambarkan solidaritas komunitas non-Eropa dan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah kolonial menjamin kehidupan kelas sosial menengah dan bawah selama masa depresi ekonomi.

Ketidakmampuan pemerintah kolonial menimbulkan krisis kepercayaan rakyat terhadap penguasa tanah jajahan. Ingleson (Ingleson, 2015: 227) menerangkan bagaimana suasana buruk di Hindia Belanda akibat krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kolonial dalam surat-menyurat antara Thamrin dengan Stokvis. Kaum buruh yang terus mengalami himpitan ekonomi berusaha menuntut kesejahteraan kepada pemerintah kolonial. Dalam hal ini, buruh diartikan sebagai orang yang bekerja pada perusahaan baik swasta maupun pemerintah untuk memperoleh gaji atau upah (Yuliati, 2012: 1). Oleh karenanya, tidak terbatas pada buruh swasta, tetapi juga buruh yang bekerja di sektor pemerintahan. Melalui pertemuan-pertemuan terbuka, beberapa serikat buruh melakukan protes atas kebijakan pemerintah kolonial. Suara yang tidak didengarkan tentu akan membuat kaum buruh melakukan hal-hal yang lebih mencemaskan pemerintah kolonial. Hal tersebut yang diwaspadai oleh pemerintah kolonial karena mereka dekat dengan kelompok pergerakan khususnya di perkotaan yang menjadi sentrum pergerakan nasional.

Kedekatan serikat buruh dengan organisasi pergerakan nasional tidak terhindarkan lagi, karena didorong oleh tujuan yang sama. Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) merupakan dua organisasi pergerakan berbasis nonkooperatif yang keras menentang pemerintah kolonial dan dekat dengan serikat-serikat buruh. Terdapat pula kader PNI Baru yang menjadi aktivis buruh (Ingleson, 2015: 462). Tekanan ekonomi pada masa depresi yang berdampak pada kehidupan sosial tentu meningkatkan intensitas pergerakan mereka, di mana menurut Sartono Kartodirdjo (1967: 46) timbulnya krisis-krisis ekonomi mempercepat gerakan nasional untuk ke arah yang lebih radikal dan revolusioner. Protes-protes dilancarkan oleh serikat buruh dan organisasi pergerakan. Salah satu yang menyita perhatian yaitu protes "aksi satu hari". Aksi tersebut digelar oleh serikat buruh dan organisasi-organisasi politik dipertemuan Jawa pada 13 Agustus 1933 (Ingleson, 2015: 361). Digelar rapat umum di beberapa kota sebagai bentuk protes terhadap pemerintah kolonial. Namun, tidak sedikit pula yang dibubarkan oleh polisi, terlebih keikutsertaan anggota-anggota Partindo dan PNI Baru dalam rapat umum tersebut.

Bentuk protes yang lebih keras dilakukan oleh para kelas bumiputra di kapal *De Zeven Provinciën* pada tahun 1933. Pengurangan gaji pada masa depresi dan cara pengurangan itu diumumkan menjadi salah satu faktor pendorong gerakan protes yang diejawantahkan melalui pemberontakan di kapal (Blom, 2015: 33). Pada Februari 1933, pemberontakan tersebut terjadi dan pada akhirnya berhasil dipadamkan. Para kelas yang terlibat dalam pemberontakan mendapat hukuman. Bagaimanapun juga, apa yang terjadi di *De Zeven Provinciën* merupakan tindakan yang merepresentasikan ketidaksukaan buruh pada kebijakan pemerintah kolonial pada masa depresi dengan pemotongan gaji. Aksi tersebut juga menunjukkan melunturnya relasi antara bumiputra dengan pihak kolonial yang tidak dapat menjamin kehidupan kelas.

Di tahun yang sama, organisasi pergerakan yang memprotes kebijakan pemerintah kolonial mendapat sikap represif melalui pemberhentian paksa rapat-rapat yang digelar dan penangkapan terhadap pimpinan Partindo dan PNI Baru. Sukarno ditangkap terlebih dahulu, kemudian menyusul Mohammad Hatta dan pimpinan PNI Baru lainnya. Penangkapan tersebut tidak terlepas dari *vergader verbod* yang digulirkan di bawah kekuasaan Gubernur Jendral de Jonge. PNI Baru memang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial terlebih kursus dan tulisan-tulisan mereka yang menjangkau kalangan bumiputra. Perjuangan proletariat (petani, pekerja dan pedagang) melawan kapitalisme secara sistematis diberitakan oleh PNI Baru (*Geheim Vervolgrapport Over De Pendidikan Nasional Indonesia, 28 April 1933: 3*). Pada tahun 1936, Partindo bubar, sedangkan PNI Baru pergerakannya mulai tidak terlihat, meskipun secara resmi tidak pernah membubarkan diri.

Gerakan buruh semakin terdesak karena sikap pemerintah kolonial yang memperketat digelarnya rapat-rapat umum, di samping sulitnya pendapatan buruh untuk mendukung keuangan serikat. Pemangkasan anggaran menjadi pilihan untuk mempertahankan gerakan serikat buruh selama masa depresi ekonomi. Seperti yang dibahas dalam pelaksanaan kongres Persatuan Vakbond Pegawai Negeri (PVPN) pada Desember 1933 hingga Januari 1934 (Ingleson, 2015: 382). Kemerosotan anggota juga terjadi pada serikat buruh. Tentu hal ini juga memengaruhi aktivisme mereka dalam menyuarakan hak buruh terhadap pemerintah kolonial. Penurunan tersebut terus terjadi hingga pergerakan nasional didominasi oleh organisasi-organisasi kooperatif memasuki tahun 1936.

KESIMPULAN

Depresi ekonomi yang disebabkan oleh faktor eksternal dan diperparah oleh faktor internal tidak hanya berdampak pada perekonomian Hindia Belanda, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan politik. Buruknya penanganan pemerintah kolonial dalam mengatasi dampak depresi ekonomi yang ditunjukkan dengan sikap diskriminatif, pemecatan dan pemotongan gaji, serta abai terhadap masukan rakyat memicu menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Krisis kepercayaan yang tumbuh di kalangan bumiputra ditunjukkan melalui aksi protes oleh serikat buruh dan organisasi pergerakan berbasis nonkooperasi guna menentang kebijakan pemerintah kolonial. Meski aksi protes melalui serikat kerja dan pergerakan organisasi nonkooperasi tidak dilakukan oleh keseluruhan bumiputra karena mayoritas pergerakan dilakukan di kota-kota besar, akan tetapi hal tersebut merepresentasikan sikap bumiputra secara umum terkait kekecewaan mereka terhadap pemerintah kolonial. Hal ini semakin mempertegas perbedaan kelas dalam struktur sosial Hindia Belanda, yakni pertentangan antara bumiputra dan bangsa Barat sebagai pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, yang terjadi pada periode awal 1930an telah menunjukkan bahwa depresi ekonomi bukan sekadar peristiwa ekonomi, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial khususnya relasi antarstruktur, yakni pemerintah kolonial dan

bumiputra. Depresi telah menimbulkan ekses-ekses sosial berupa pengangguran dan kemiskinan, dan memicu adanya aksi protes bumiputra karena turunnya kepercayaan terhadap pemerintah kolonial yang cenderung diskriminatif dalam penanganan dampak depresi ekonomi, sehingga terlihat polarisasi antara bumiputra yang ditempatkan pada struktur sosial bawah dan bangsa Barat yang menempati struktur sosial atas.

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Jurnal

- Blom 1943-, J. C. H. (2015). *De Zeven Provincien : ketika kelas Indonesia berontak (1933) / J.C.H. Blom, E. Touwen-Bouwsma ; pengantar, Taufik Abdullah (E. Touwen-Bouwsma, Ed.)*. Menteng, Jakarta: LIPI Press.
- Gottschalk, L., & Notosusanto, N. (1975). *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hudiyanto, R. (2009). Yang Tersisa di Tengah Kemajuan: Kaum Miskin di Kota Malang 1916-1950. In S. Margana & M. Nursam (Eds.), *Kota-kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial* (pp. 133–142). Yogyakarta: Ombak.
- Ingleson, J. (2013). *Perkotaan, masalah sosial dan perburuhan di Jawa masa kolonial*. Komunitas Bambu.
- Ingleson, J. (2015). *Buruh, serikat dan politik: Indonesia pada 1920an-1930an*. Marjin Kiri.
- Kartodirdjo, S. (1967). Politik Kolonial Belanda Antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. *Lembaran Sejarah, IV(8)*, 30–50.
- Kuntowijoyo, M. S. (2003). Yogyakarta: PT. *Tiara Wacana Yogya*.
- Leirissa, R. Z. (1996). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Lindblad, T. (2016). Krisis Ekonomi dalam Sejarah Indonesia Abad ke-20: Tinjauan Ekonomi Makro. In B. White & P. Boomgaard (Eds.), *Dari Krisis ke Krisis: Masyarakat Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Selama Abad 20* (pp. 20–45). Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Lucas, A. (1989). *Peristiwa Tiga Daerah* (1st ed.). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Miftahuddin. (2002). Surakarta pada Masa Depresi Ekonomi 1930an. *Lembaran Sejarah, IV(2)*, 51–68.
- Neytzell de Wilde, A., Moll, J. T., & Gooszen, A. J. (1936). The Netherlands Indies during the Depression, a Brief Economic Survey. *Amsterdam, Meulenhoff*.
- Notosusanto, N., & Poesponegoro, M. D. (2008). Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda. *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Osseweijer, M. (2016). Krisis Perikanan di Kepulauan Riau. In B. White & P. Boomgaard (Eds.), *Dari Krisis ke Krisis: Masyarakat Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Selama Abad 20* (pp. 109–133). Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Pelzer, K. J. (1978). *Planter and peasant: Colonial policy and the agrarian struggle in East Sumatra 1863-1947*. Brill.
- Reed, L. W. (2010). *Mitos Meleset Malaise*. Jakarta: Freedom Institute.
- Schaik, van A. (1996). Pahit-pahit Manis: Seabad Industri Gula di Comal. In F. Husken & D. Suryo (Eds.), *Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad Ke-20*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.

- Statistics, C. B. of. (1947). *Statistical Pocketbook of Indonesia 1941*. Department of Economic Affairs Batavia.
- Stroomberg, J. (2018). *Hindia Belanda 1930*. IRCiSoD.
- Sudarno, S. (2019). *Politik Kolonisasi Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia 1905-1942*. Yogyakarta: Dialog Pustaka.
- Sulistyo, B. (1995). *Pemogokan buruh: sebuah kajian sejarah*. Tiara Wacana Yogya.
- Wahid, A. (2009). *Bertahan di tengah krisis: komunitas Tionghoa dan ekonomi kota Cirebon pada masa depresi ekonomi, 1930-1940*. Ombak.
- Warto, W. (2010). *Memorie van Overgave (M.v.O): Potret Hindia Belanda dalam Ingatan Residen Rembang 1905-1936*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Wibowo, A. (2012). *Gaya Hidup Masyarakat Eropa di Batavia Pada Masa Depresi Ekonomi (1930-1939)*. Depok: FIB-UI.
- Yulianti, D. (2012). Nasionalisme Buruh Dalam Sejarah Indonesia. *HUMANIKA*, 16(9).
- Zuhdi, S. (2002). *Cilacap (1830-1942): bangkit dan runtuhnya suatu pelabuhan di Jawa*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Arsip dan Dokumen

- ANRI, *Geheim Vervolgrapport Over De Pendidikan Nasional Indonesia, dalam Congress Pendidikan Nasional Indonesia D/65*.
- Daulat Ra'jat*, 10 Januari 1934.
- Daulat Ra'jat*, 20 Juli 1932.
- Fikiran Ra'jat*, 11 November 1932.
- Fikiran Ra'jat*, 23 September 1932.
- Indisch Verslag 1932*.
- Indisch Verslag 1935*.
- Indisch Verslag 1936*
- Prisma 8 Agustus 1983*.